

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

Untuk bisa meneliti tentang Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara tahun 2017-2020 di butuhkan teori-teori yang sesuai dengan judul penelitian untuk bisa membantu peneliti dalam merumuskan suatu kajian masalah terkait dengan Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara tahun 2017-2020.<sup>1</sup>

##### 1. Teori pelebagaan partai politik.

Menurut Huntington pada negara berkembang kekokohan partai politik sangat tergantung pada kemandirian partai politik sehingga dapat melebaga dengan baik dan kokoh setiap pelebagaan partai politik dapat di tentukan dari beberap dimensi yaitu:

##### a. Adanya dimensi penyesuaian diri dan kekakuan

Keluwesan dan kekakuan partai politik sangat mempengaruhi tingkat pelebagaan dan jika partai politik tidak begitu luwes juga sangat mempengaruhi tingkat pelebagaan terhadap tinggi rendahnya tingkat pelebagaannya, terdapat cara-cara dalam adaptasi partai politik salah satunya dilihat dari segi umur yang di golongankan menjadi tiga cara pertama di lihat dari perhitungan kronologis artinya semakin lama umur dari partai politik semakin tinggi tingkat pelebagaannya.

Kedua di lihat dari segi umur partai politik masih mengikuti tokoh tokoh atau cikal bakal dan masih menganut cara dalam

---

<sup>1</sup> Anissa Setya Mardani, strategi marketing dalam pengembangan UMKM kopi jetak mentari menurut perspektif syariah (progam studi ekonomi syariah) Kudus, Institut Agama Islam Negeri Kudus 2020, hal 9.

pemecahan masalah dan aturan-aturan dari cikal bakal maka pelembagannya masih rendah dan jika partai politik berdiri sendiri untuk beradaptasi dan mempunyai tokoh-tokoh baru sehingga bisa merumuskan masalah maka semakin tinggi tingkat pelembagannya.

Ketiga yaitu segi fungsi partai politik yang mampu berkembang dan beradaptasi dalam lingkungan luar dengan perubahan-perubahan dan mampu merubah peraturan-peraturan lingkungan yang inti mempunyai tingkat pelembagan yang tinggi di banding partai politik yang tidak mampu beradaptasi dalam lingkungan luar terhadap peraturan-peraturan yang berbeda maka tingkat pelemagaannya semakin rendah.

Ukuran pelembagaan bisa di lihat di partai politik dengan sejauh mana partai politik bisa beradaptasi dalam perubahan fungsi tidak hanya di lihat dari kemampuan partai politik dalam menjalankan fungsi.

2) Dimensi kompleksitas dan kesederhanaan

Suatu partai politik juga di lihat dari dimensi kompleksitas suatu partai dimensi komlek menjadi salah satu yang penting dalam tingkat pelembagaan.

3) Dimensi otonomi-subordinasi

Dimensi ini belajar tidak adanya pengaruh dari luar atas berbagai masalah dalam mencari pintu keluar yang di harapkan bisa merumuskan suatu permasalahan partai sehingga tidak perlunya pendapat dari partai politik lain dari dimensi otonomi di harapkan partai bisa menjadi motifasi percaya diri dalam melakukan yang terbaik di dalam partai tanpa surungan dari pihak lain.

4) Dimensi kesatuan dan perpecahan

Di dalam partai kesatuan sangatlah penting untuk mempersatu anggota-anggota dalam pekerjaan, kekompakan dan lain-lain

sehingga terbangun pelembagaan yang tinggi dan jika dalam partai politik tidak adanya kekompakan atau kesatuan dalam pekerjaan maka akan rendahnya pelembagaan partai.

Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp dalam Asshidiqie terhadap ciri-ciri pelembagaan partai politik yaitu pertama usia partai politik di dalam partai politik untuk bisa berkembang harus melalui seleksi alam yang perlu waktu yang lama jika partai politik mampu melalui seleksi alam dengan waktu yang lama maka partai politik mampu berdiri sendiri dengan kemampuan yang telah di dapatkan dalam proses seleksi sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam partai sehingga selalu melembaga.

Kedua depersonalisasi organisasi terkadang adanya permasalahan terhadap pergantian kepemimpinan yang belum begitu sukses dalam menjalankan partai sehingga individu kerap menjadi permasalahan ketika tidak adanya kesuksesan partai apalagi pada saat pergantian pemimpin yang mempunyai jasa yang di gantikan pemimpin lain yang belum bisa mensukseskan partai dan belum bisa membuat peraturan-peraturan politik di abaikan oleh anggota partai maka partai tersebut belum bisa melembaga dengan baik.

Ketiga di ferensiasi organisasi yaitu kemampuan partai dalam mengatur anggota-anggota partai untuk melakukan dukungan terpenting dalam partai dalam memajukan partai, karena itu di dalam partai semua system harus rapi dan terarah sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat di tamping dan di selesaikan dengan cepat dan baik.

Menurut Randal dan svasand pelembagaan partai politik merupakan kegiatan yang menjadikan partai politik dari kegiatan yang kokoh penyajian kegiatan kesetabilan dari

tindakan maupun tingkah laku yang menjadikan partai politik tidak hanya menjadi organisasi tapi juga terdapat dimensi-dimensi dalam partai politik yaitu dimensi internal, dimensi eksternal, dimensi struktural yang saling persilangan sehingga menghasilkan drajat kesisteman hasil persilangan dari internal dan struktural, derajat identitas nilai hasil persilangan antara internal dan kultural, derajat otonomi partai hasil persilangan dari eksternal dan struktural dalam pengambilan keputusan serta derajat pengetahuan publik hasil persilangan dari eksternal dan kultural.

Menurut Randal dan svasand pelebagaan partai politik

Tabel 2.1

	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman.	Derajat otonomi pengambilan keputusan.
Kultural	Derajat identitas nilai.	Derajat pengetahuan publik.

a. Derajat keislaman

Ramlan Surbakti mengartikan bahwa drajat keislaman menjadi sesuatu fungsi dalam partai politik sesuai dengan aturan-aturannya dan sesuai dengan persyaratan yang sudah di rumuskan dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) dalam partai politik dan apabila fungsi-fungsi tersebut di laksanakan sesuai aturan dan sesuai dengan persyaratan sesuai yang d rumuskan dalam anggaran dasar (AD) dan sesuai dengan anggaran rumah tangga (ART) maka partai politik telah di katakana sudah melembaga dalam derajat keislaman.

Partai politik memiliki karakteristik yang berbeda beda karakteristik menjadi pembeda di antara partai politik yang sangat

menonjol dan menjadi karakter atau pembeda dari partai politik lain yang menjadi pengaruh dari kesisteman yaitu: pertama bagaimana cara partai politik tumbuh dan berkembang di masyarakat di lihat dari asal-usul partai atau sejarah pendirian partai sampai sepak terjang partai itu dalam perkembangan cara rekruten, kampanye, dan lain-lain. Kedua keuangan partai politik yang lancar dari dalam partai politik ketiga tidak adanya suntikan dana dari dalam partai politik atau masing-masing anggota. Tapi pada kenyatan nya para politisi jika ingin bersaing membutuhkan dana yang banyak. Tapi juga ada karismatik di jadikan alat utuk menumbuhkan partai politik tapi itu tidak berujung lama hanya biasa sekian waktu saja uang dan karismatik harus berjalan seiringan untuk membangun partai politik yang maju.

b. Derajat identitas nilai

Derajat identitas nilai ada hubungannya dengan orientasi kebijakan atau tindakan dari partai politik berdasarkan ideologi partai tidak hanya di posisi arah kebijakan tapi lebih mengarah pada posisi sosial pendukungnya, partai politik mempunyai sayap-sayap partai dalam membantu mewujudkan visi-misi dari partai politik untuk mempermudah perkembangan partai politik dan jika partai politik tidak gotong-royong dengan sayap partai partai politik sulit dalam mengembangkan partai politik dengan kekuatan internal partai politik.

Partai politik biasa di katakan sudah melembaga dalam derajat identitas nilai jika partai politik mampu mengandeng organisasi-organisasi dari masyarakat contohnya: membuat sekumpulan pemuda masyarakat dalam membangun partai politik, membuat sekumpulan wanita dalam membangun partai

politik bahkan membuat sekumpulan dari orang-orang yang berpengaruh di masyarakat sehingga biasa cepat dalam membangun partai politiknya dengan dari lapisan masyarakat tersebut adalah sukarela tidak karena adanya nilai material.

- c. Derajat otonomi partai dalam pengambilan keputusan

Derajat otonomi partai dalam pengambilan keputusan mengarah pada ketergantungan partai politik pada aktor eksternal, aktor dari luar menjadikan pelebagaan partai menjadi terganggu dan secara otomatis pelebagaan partai melemah aktor dari luar menjadi pengaggu dari jalannya roda kepartaian di dalam partai melalui derajat otonomi partai dalam pengambilan keputusan aktor dari luar bisa berbentuk siapa saja yang biasa mempengaruhi pengambilan keputusan partai politik yang bisa menjadikan pelebagaan partai menjadi terganggu dan melemah.

Partai politik bisa di katakan sudah melembaga jika derajat otonomi partai dalam pengambilan keputusan tidak adanya pihak dari luar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pihak dalam partai mampu merumuskan keputusan-keputusan yang sekiranya bisa di jalankan oleh partai itu tanpa adanya pihak luar yang ikut campur dalam.

- d. Derajat pengetahuan publik.

Derajat pengetahuan publik merupakan sejauh mana masyarakat dan partai politik saling berhubungan erat sehingga menimbulkan pengetahuan publik terhadap masyarakat yang sulit untuk di hilangkan, lebih mengarah pada tindakan partai politik kepada masyarakat bukan tindakan masyarakat terhadap partai politik bisa di rumuskan semakin lama partai politik di masyarakat

dengan tindakan yang baik atau tidak baik maka masyarakat akan mengetahui pengetahuan positif maupun negatif terhadap partai politik.

Partai politik bisa dikatakan telah melembaga ketika apabila partai politik mampu menanamkan derajat pengetahuan publik kepada masyarakat dengan pengetahuan yang baik dan bisa menjadikan contoh kehidupan partai politik di masyarakat secara umum.

Menurut Basedau dan stroh membagi 4 aspek pelebagaan partai politik yaitu

**Tabel 2.2**

<b>Dimensi Pelebagaan</b>	<b>Indikator</b>
Pengakaran di masyarakat: partai politik harus di kenal di masyarakat sehingga membentuk akar di masyarakat.	Lamanya umur partai terhadap kemerdekaan. Lamanya umur partai permulaan. Perbedaan dukungan elektoral Saat pemilu terakhir. Terdapat intraksi fisik dengan masyarakat kecil.
Otonomi: walaupun partai berakar dari masyarakat, partai selalu berdiri sendiri tidak bergantung oleh kelompok luar dan dari individu lain partai.	Nilai dari jumlah partai dalam pergantian pemimpin. Perubahan dukungan elektoral pada saat di gantinya pemimpin partai politik. Terdapat otonomi dari keputusan individu dan partai. Penghargaan masyarakat terhadap partai.
Organisasi: anggota organisasi bertindak dengan serius di tingkat administrasi dan tindakannya semata-mata untuk kepentingan partai.	Power anggota partai. Adanya sumberdaya materi dan manusia. Kedatangan organisasi dari berbagai negara menimbulkan banyak kegiatan dalam organisasi tidak hanya kegiatan pemilihan dengan kampanye.

Dimensi Pelebagaan	Indikator
Koherensi: tingkahlaku partai merupakan kesatuan partai, terdapat tindakan-tindakan tertentu dalam permasalahan anggota partai.	Koherensi dari anggota parlemen ( tidak keluar dari partai ). Hubungan baik dalam pengelompokan di partai ( semua memiliki fungsi masing-masing ) Penghormatan semua anggota internal partai.

Dari pengertian Randall dan Svasand di atas kemudian di artikan lagi oleh Basedau dan Stroh dengan 4 aspek pelebagaan partai politik adalah pertama Pengakaran di masyarakat partai politik harus di kenal di masyarakat sehinga membentuk akar di masyarakat. Kedua Otonomi walaupun partai berakar dari masyarakat, partai selalu berdiri sendiri tidak bergantung oleh kelompok luar dan dari individu lain partai. Ketiga Organisasi anggota organisasi bertindak dengan serius di tingkat administrasi dan tindakannya semata-mata untuk kepentingan partai. Keempat Koherensi tingkahlaku partai merupakan kesatuan partai terdapat tindakan-tindakan tertentu dalam permasalahan anggota partai.<sup>2</sup>

pandangan keislaman tentang pelebagaan partai politik yang telah di jelaskan dalam Al-Quran dan hadis dalam

Surat Al Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً  
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ  
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

---

<sup>2</sup> Sigit pamungkas, *partai politik teori dan praktik di Indonesia*, ( Institute for Democracy and welfarism Perum Griya Saka Permai Jl. Arjuna A-21 Plumbon, Sardonoarjo, Ngaglik, Seleman, Yogyakarta 2011) hal 70.

Artinya: Mereka berkata: "Mengapa Allah akan menciptakan pemimpin di bumi yaitu seorang pemimpin yang akan merusak bumi dan saling membunuh, padahal kami selalu menyembah dan selalu menyebut nama mu?" Allah berfirman: "Sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"<sup>3</sup>

Surat At-Taubat ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "baik pemimpin laki-laki maupun pemimpin perempuan yang beriman adalah mengajak kebaikan dan melarang kejahatan, melaksanakan dalam jalan Allah akan diberi rahmat oleh Allah."<sup>4</sup>

Surat at-Naml Ayat 23

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ  
عَرْشٌ عَظِيمٌ

<sup>3</sup> Umar Sidiq, kepemimpinan dalam islam: kajian tematik dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dialogia, vol. 12 no. 1 juni 2014 hal 128.

<sup>4</sup> Yuminah Rohmatullah, kepemimpinan perempuan dalam islam: melacak sejarah feminisme melalui pendekatan hadis dan hubungannya dengan hukum Negara, jurnal syariah, jurnal ilmu hukum dan pemikiran, Volum 17, Nomor 1 juni 2017, hal 110

Artinya: Adanya utusan Nabi Sulaiman melihat pemimpin perempuan yang mempunyai kerajaan yang besar dan mewah.<sup>5</sup>

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْيَتِمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ  
 أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  
 - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ  
 أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ  
 اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا  
 عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>6</sup>

Artinya: Yaitu: perang saudara umat islam yang terbagi menjadi dua Kepemimpinan Aisyah dan kepemimpinan oleh Ali bin abi Talib umat. (HR. Bukhari)

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى  
 الله عليه وسلم قال : "أَلَا كُتِلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ  
 عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Masing- masing Kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab apa yang di pimpin.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Syafieh, Potret Karakteristik Kepemimpinan Perempuan (Analisis Semiotika Surat Al-Naml: 23-44), Jurnal At-Tibyan, Volume 3 No. 1, Juni 2018, 46.

<sup>6</sup><https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinanperempuan-dalam-kajian-hadits>.

<sup>7</sup> Novita Pancaningrum, Kontekstual Konsep Pemimpin Dalam Teks Hadis, Riwayah: Jurnal Studi Hadis issn 2460-755X eissn 2476-9649 Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah) DOI: -, Volume 4 Nomor 2 2018, hal 217.

### 5) Teori peran

Peran merupakan suatu yang melekat di diri seseorang berdasarkan kedudukan di dalam masyarakat, peran kerap kita jumpai di dalam masyarakat seperti peran pemerintah desa dan para perangkat dalam mensosialisasikan suatu program pemerintah desa, peran juga di artikan sebagai perilaku seseorang dalam panggung hiburan yang mempunyai peran masing masing dalam hiburan drama dapat memerankan tokoh-tokoh yang berbeda-beda sesuai dengan peran masing-masing sama-sama dalam satu pentas pertunjukan seni drama.

Peran dapat di artikan sebagai tindakan atau tugas seorang pemain seni drama yang di tampilkan dalam tontonan drama yang berada dalam satu tempat. atau dalam masyarakat yaitu peran yang di jalankan seseorang berdasarkan jabatan dalam masyarakat.

Dari beberapa pengertian terhadap peran diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah perilaku seseorang berdasarkan pangkat atau jabatan yang dimiliki yang saling sambung menyambung dan terdapat dalam satu tempat dan tempat yang lain yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Biddle dan Thomas peran di kelompokkan menjadi empat yaitu: individu yang ikut dalam peran di masyarakat, tindakan yang terjadi dalam masyarakat, jabatan dalam berperan, individu dan peran.

Menurut Riyadi peran merupakan penyajian informasi-informasi dari berbagai pengalaman sosial di masyarakat sehingga orang atau kelompok masyarakat ataupun tokoh masyarakat berperan sesuai adat dalam masyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang telah di buat oleh tokoh masyarakat yang telah di tetapkan dan di setujui oleh segenap masyarakat.

Menurut Soekanto peran di bagi menjadi tiga 3

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang di dapat karena jabatan yang telah menjadi tanggung jawab seseorang yang memaku jabatan tersebut.

b. Peran partisipasi

Peran partisipasi merupakan peran yang di dapat seseorang karena terlibat partisipasi dalam kegiatan dalam organisasi atau sosial masyarakat.

c. Peran pasif

Peran yang di lakukan secara pasif yang bertujuan untuk lebih bisa memperlancar kegiatan organisasi atau kelompok.<sup>8</sup>

**6) Konsep Perempuan dalam Politik**

Perempuan dalam dunia politik adalah masalah yang menuntut untuk adanya kesetaraan hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki masalah perempuan menjadi aspek utama dalam relasi kelas golongan usia maupun identitas dan, perempuan hanya pada posisi pendamping laki-laki perempuan sering kali tersingkir dari peran-peran laki-laki itu merupakan pengaruh yang besar terhadap perkembangan perempuan di dunia politik sehingga perempuan hanya bisa reproduksi dan tidak produktif.

Lahirnya konsep dari gender merubah persaingan antara kaum laki-laki dan perempuan secara umum untuk menciptakan peluang dalam kehidupan di masyarakat tanpa adanya pengaruh gender gender adalah suatu budaya yang menjadikan perbedaan peran, atau sifat emosional tindakan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>8</sup> Syaron brigettle lantaeda Florence daicy J. lengkong joorie m ruru, peran badan perencanaan pembangunandaerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon, jurnal administrasi publik, volum 04 No 048 hal 2.

Ide dari gender di temukan oleh Margaret Mead dari Amerika dan merupakan ahli ilmu antropologi dari kutiban Koentjaraningrat tahun 1932 di Papua Nugini adalah untuk kegiatan penelitian masyarakat primitif namun juga banyak masyarakat di pupua di antaranya terdiri dari masyarakat Arapesh masyarakat Tchambul dan masyarakat Mundugumor, para ahli sosial dan seksiologi menganggap ide itu merupakan bahasan dari gender, walaupun belum mengenal apa itu gender.

Namun berbeda halnya penelian yang di lakukan oleh Meed pada masyarakat Arapesh di Papua Nugini yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya dalam hal psikologi sama-sama memiliki sifat yang tidak agresif dari ucapan dan tindakan sehari-hari, berbeda halnya dengan masyarakat Tchambul memiliki sifat kebalikan antara sifat laki-laki dan sifat perempuan di masyarakat Tchambul perempuan-perempuan mengerjakan pekerjaan berat laki-lagi bekerja di bidang perempuan dalam mengutamakan penampilan yang tampan dan menghindari pekerjaan kasar karena laki laki menjadi perebutan kaum perempuan, sedangkan di masyarakat Mundugumor perempuan maupun laki-laki sama sama memiliki sifat kasar dan agresif.

Tahun 1970 telah menunakan istilah gender Ann Oakley pembeda kan antara laki-laki dan prempuan gender adalah pembeda peran antara laki-laki dan prempuan peran antara prempuan dan laki-laki sangat berbeda antara faktor domestik dengan faktor publik sehingga dari gender tersebut bisa menciptakan keadilan sosial biar tidak adanya kecemburuan di antara laki-laki dan perempuan.

Perubahan sosial di masyarakat membuat ketidak nyamanan dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan ketidak keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan baik di dalam sosial, agama maupun budaya, pekerjaan yang selalu

mengutamakan laki-laki dalam bekerja sehingga perempuan mendapatkan ketidakadilan, ketidakadilan gender merupakan melanggar Hak Asasi Manusia yang menjamin atas hak-hak bekerja, hak hidup, hak publik, hak politik, hak atas peran yang sama dengan laki-laki dan lain-lain.

Seks di sangkut pautkan dengan gender suatu yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan secara fisik dan sifat dan gender lebih mengarah pada sosial, budaya, agama, sosiologi dan biologi dilihat secara teoristik terdapat dua pengertian gender yaitu:

Gender adalah: peran masing-masing antara perempuan dan laki-laki yang dapat membedakan contoh: kostum yang di pakai laki-laki berbeda dengan kostum yang di pakai perempuan itu merupakan suatu pembeda antara laki-laki dan perempuan.

a. Gender adalah: dimasyarakat terdapat banyak identitas, budaya, serta agama yang berbeda yang dapat menjadi pembeda khususnya antara laki-laki dan perempuan dalam peran di dalam identitas, budaya dan agama di masyarakat yang sudah di gariskan oleh Allah.

Gender sering kali di sebut paham feminis yaitu: suatu tindakan terhadap perempuan yang tidak semestinya di lakukan kepada perempuan dalam bentuk ketidakadilan, penindasan, dan perlakuan merendahkan kaum perempuan sesuai dengan deklarasi Beijing dengan tema perempuan dan kemiskinan di dalamnya terdapat suatu tindakan kekejaman terhadap kaum perempuan.

Bias gender adalah fakta tidak adanya perlawanan oleh kaum perempuan berkiprah di politik karena adanya pandangan dan perubahan dari masyarakat yang menilai bahwa perempuan mempunyai tindakan yang kurang tegas, sifat yang ramah, tidak mampu membuat kebijakan semua kebijakan berada dalam pelaturan laki-

laki oleh karena itu perempuan tidak berdaya dalam dunia politik akibat dari bias gender terhadap perempuan yaitu:

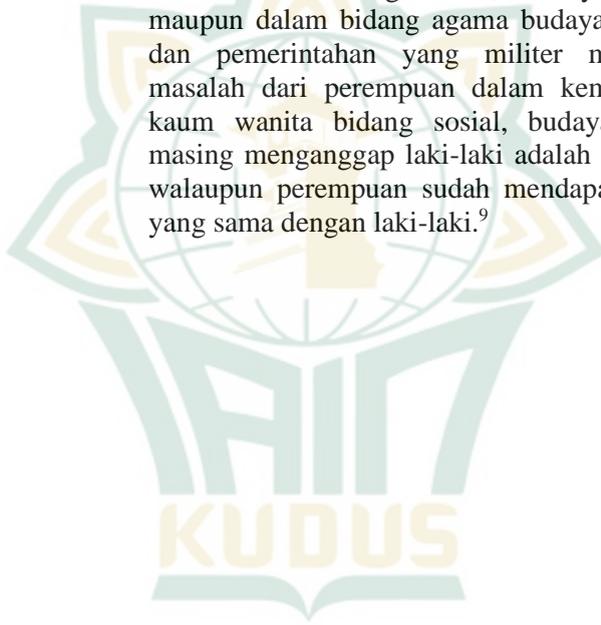
- 1) Dari akibat bias gender menimbulkan tindakan yang selalu membatasi kaum perempuan ketimbang laki-laki.
- 2) Dari akibat bias gender menimbulkan ketidakadilan antara peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran yaitu: peran bekerja laki-laki selalu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan laki-laki sedangkan peran perempuan yang tidak sesuai karena dalam tekanan laki-laki.

Menurut Nazarudin yaitu: Peran perempuan dan laki-laki memang tidak seimbang di masyarakat dan menjadi peran laki-laki yang dilihat begitu lengkap di masyarakat sedangkan peran dari perempuan tidak selengkap peran laki-laki dan peran-peran itu menjadi masalah gender, dan menurut Murniati dan menurut Rusbeth Moss kanter 's yaitu: permasalahan gender atau perempuan dan laki laki dalam masyarakat terjadi karena adanya kekurangan dari perempuan dalam melakukan peranannya baik di politik maupun di masyarakat sehingga laki-laki maju di depan untuk menjalankan peran tersebut.

Dalam pandangan sosial terdapat teori nature dan nurture pandangan sosial dan teori tersebut berarti perempuan menjadi terkucilkan di masyarakat tempatnya hidup dan perempuan mendapatkan tindakan yang tidak sesuai dengan laki-laki dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia perempuan melalui gerakan individu membuat organisasi-organisasi perempuan dalam memperjuangkan Indonesia dari penjajah saat peristiwa 30 September 1965 organisasi perempuan menjadi dominan dalam memperjuangkan Indonesia merdeka dari penjajah tapi *political will* lah yang di anggap

dominan dan mendapat dukungan dari pemerintah.

Di Indonesia perempuan menjadi wakil dari laki-laki lebih-lebih jika sudah berumah tangga di saat-saat ini adalah permasalahan dari pihak perempuan yang semua tindakannya tergantung dari restu suami perempuan juga mendapatkan hak dalam memutuskan suatu kebijakan jika terdapat persetujuan dari suami dan peran perempuan akan menjadi wakil dari laki-laki baik dalam bidang sosial, budaya, politik maupun dalam bidang agama budaya patriarki dan pemerintahan yang militer menambah masalah dari perempuan dalam kemerdekaan kaum wanita bidang sosial, budaya, politik masing menganggap laki-laki adalah segalanya walaupun perempuan sudah mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> Evi Yunita Kurniaty, Bimby Hidayat, Syahrial Efendy, Rudi Salam Sinag, Peran Wanita Persatuan Pembangunan Dalam Rekrutmen Perempuan Di Partai Persatuan Pembangunan, Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, VOLUME 3/ NOMOR 2 / DESEMBER 2016 hal 168-171

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
Evi Yunita, Bimby Hidayat, Syahlial, Efendi, Rudi 2009	Peran Wanita Persatuan Pembangunan dalam rekrutmen perempuan di Partai Persatuan Pembangunan tahun 2009	Metode kualitatif	Mendapatkan bahwa peran Wanita Persatuan Pembangunan sangat tergantung pada penepatan peran yang di tetapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan dalam studi ini terlihat upaya Wanita Persatuan Pembangunan untuk meningkatkan jumlah partisipasi perempuan masuk ke are politik seperti pengurus partai dan calon legislatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian ini lebih berfokus pada peran perempuan dalam rekrutmen perempuan di Partai Persatuan Pembangunan tahun 2009, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Evi Yunita, Bimby Hidayat, Syahlial, Efendi, Rudi, Peran Wanita Persatuan Pembangunan Dalam Rekrutmen Perempuan Di Partai Persatuan Pembangunan, Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, VOLUME 3/ NOMOR 2 / DESEMBER 2016

Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
Yulita	Peran politik perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa	metode kualitatif.	Hasil penelitian Partai Kebangkitan Bangsa dari dulu sejak baru berdiri sudah menegaskan partai bersifat inulatif nilai kemanusiaan sebagai dasar untuk bertindak sehingga Partai Kebangkitan Bangsa anomer satukan perempuan dalam bertindak dan sikap Partai Kebangkitan Bangsa di politik nasional telah teruji dan kenyataannya perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa di politik nasional telah memberikan pengaruh terhadap politik di indonesia.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian ini lebih berfokus pada peran politik perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak hanya membahas mengenai peran perempuan dalam politik tapi berfokus pada Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan DI Kabupaten Jepara. <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Yulita, Peran politik perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa, (Skripsi progam Pemikiran Politik Islam ) Jakarta FAKULTAS USHULLUDDIN DAN FILSAFAT Tahun 2008.

<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>	<b>Persamaan dan perbedaan</b>
Erida Hasnah, Wirdah, R. Rida Indaryanti	Peran perempuan dalam legislatif sejak berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir	Metode kualitatif.	Hasil penelitian partisipasi politik perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup mewarnai pembangunan daerah serta kebutuhan dan kepentingan yang menyangkut perempuan terwakili.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian ini berfokus pada peran perempuan dalam legislatif sejak berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Pesatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara <sup>3</sup> .
Nidaul Hasanah tahun 2009-2014	Pandangan dan strategi partai persatuan pembangunan	Metode kualitatif	Hasil penelitian Sebagai salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan sebagai seorang legislatif dengan kuota sebesar 30% jumlah peserta caleg partai persatuan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian ini lebih berfokus pandangan dan strategi partai

<sup>3</sup> Erida Hasnah, Wirdah, R. Rida Indaryanti, Peran perempuan dalam legislatif sejak berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir, jurnal BAPPEDA, VOL 2 AGUSTUS 2016

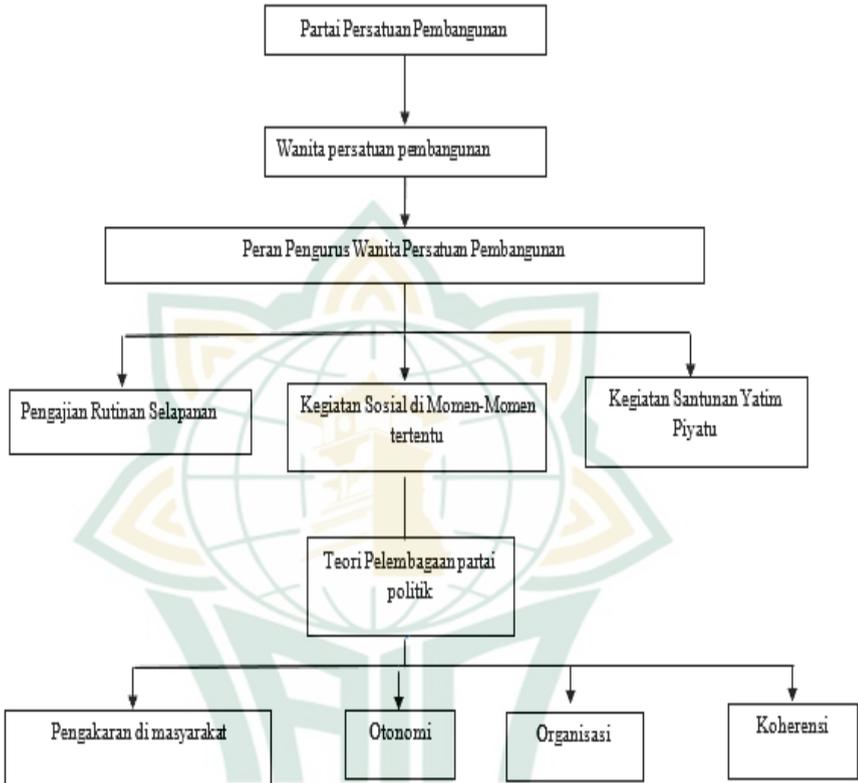
Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
	mengenai calon legislatif perempuan Kabupaten Bekasi		<p>pembangunan pada pemilu 2014 mengalami kenaikan di DPC PPP Kabupaten Bekasi dan Dengan adanya tindakan rekrutmen yang di lakukan partai persatuan pembangunan di harapkan para caleg perempuan yang maju nanti sangat kredibilitas dan berpendidikan sehingga nantinya kelak caleg tersebut lolos menjadi wakil rakyat dapat menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat nusantara. Kampanye merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan dalam pemilihan caleg legislatif perempuan, karena salah strategi kampanye dapat mengakibatkan kekalahan dalam pemilihan suara, sebelum melakukan komunikasi kelompok paar caleg partai persatuan pembangunan melakukan penentuan kelompok dengan cara “kedekatan” prinsip kedekatan di anggap efektif karena caleg bisa langsung mengarah pada</p>	<p>persatuan pembangunan dalam pemilihan caleg perempuan di Kota Bekasi Sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara penelitian ini sama sama pada partai persatuan pembangunan dengan tempat yang berbeda penelitian ini di Bekasi sedangkan penelitian saya di Kabupaten Jepara penelitian ini fokus pada rekrutmen caleg perempuan sedangkan penelitian saya berfokus pada peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam</p>

Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
			kelompok yang di anggap potensial menjadi pemilih saat pemilu. Bentuk komunikasi kelompok yang di lakukan yakni dengan cara silaturahmi, sosialisasi, melakukan bentuk komunikasi kelompok yang bersifat kekeluargaan dengan berkomunikasi melalui tokoh masyarakat dan reuni dalam strategi komunikasi antar pribadi penggunaan bahasa yang tepat menjadi salah satu strategi.	pelembagaan Partai Pesatuan Pembangunan. <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nidaul Hasanah, Pandangan dan strategi partai persatuan pembangunan mengenai calon legislatif perempuan Kabupaten Bekasi, ( Skripsi Progam Studi Hukum Tata Negara (Syasah), Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2016.

### C. Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir diatas untuk menjelaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara memiliki sayap Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara yang memiliki beberapa Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara yaitu: Pengajian Rutinan Selapanan, kegiatan Sosial diMomen-Momen tertentu dan Kegiatan Santunan Yatim Piatu dalam pelebagaan partai Persatuan Pembangunan dengan menggunakan Teori Pelebagaan Partai Politik yaitu pengakaran di Masyarakat, otonomi, organisasi, koherensi.